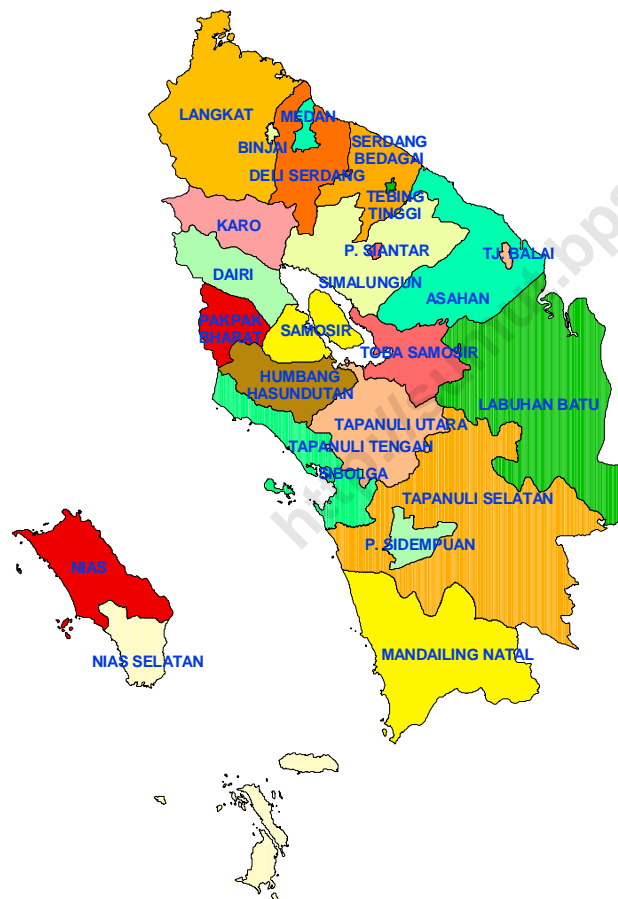




Katalog BPS: 9205.12

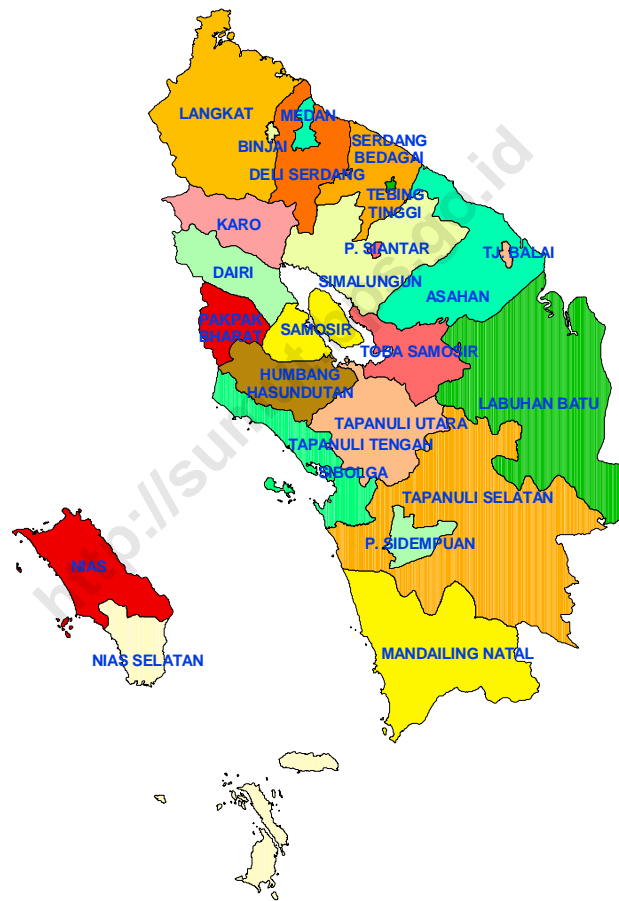
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2001-2005



BPS

BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI SUMATERA UTARA

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PROPINSI SUMATERA UTARA
MENURUT KABUPATEN/KOTA
2001-2005**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PROPINSI SUMATERA UTARA
MENURUT KABUPATEN/KOTA
2001-2005**

No. ISBN	: 979.467.214.9
Katalog BPS	: 9205.12
No. Publikasi	: 12550.06.06
Ukuran Buku	: 28 X 21 CM
Jumlah Halaman	: -----+-----
Naskah	
Penanggung Jawab Umum	: H.M. Nasir Syarbaini, SE
Editor dan Penanggung Jawab Teknis	: Syech Suhaimi, SE, M.Si.
Koordinator	: Sabar Harianja
Anggota	: Dahliani Hasnani Rangkuti Pesta Sianturi Sampun
Gambar Kulit	: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis
Diterbitkan Oleh	: Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara
Sumber Dana	: APBD Propinsi Sumatera Utara T.A. 2006

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha tahun 2001-2005 ini merupakan publikasi seri baru yang menggunakan tahun dasar 2000 sebagai kelanjutan publikasi serupa yang menggunakan tahun dasar 1993. Hal ini dilakukan seiring dengan perubahan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional, yang juga menggunakan tahun dasar 2000.

Pemilihan tahun 2000 sebagai tahun dasar disebabkan selama tahun tersebut perekonomian Indonesia dipandang relatif stabil dan awal berjalannya proses pemulihan ekonomi dengan laju pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi cukup moderat; pengaruh sistem pasar global; serta sesuai rekomendasi PBB agar penghitungan PDB atas dasar harga konstan dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan referensi yang berakhiran 0 dan 5.

Pada publikasi ini, disajikan ulasan ringkas tinjauan perekonomian Sumatera Utara menurut kabupaten/kota. Tabel yang disajikan mencakup tabel-tabel pokok PDRB setiap kabupaten/kota yang dirinci menurut lapangan usaha baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Selain tabel pokok berupa nilai nominal PDRB, disajikan juga tabel-tabel turunan seperti : distribusi persentase, indeks berantai dan indeks implisit serta perbandingan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Medan, September 2006

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI SUMATERA UTARA
KEPALA**

H.M. NASIR SYARBAINI, SE
NIP. 340003769

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	2
1.1 Pergeseran Tahun Dasar	2
1.2 Pemilihan Tahun Dasar 2000	3
BAB 2. TINJAUAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA TAHUN 2005	6
2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	6
2.2 Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota	8
2.3 Peranan PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB	10
2.4 Peranan NTB Sektorial Kabupaten/Kota terhadap Total NTB Sektorial	12
2.5 Perbandingan PDRB Perkapita	16
TABEL-TABEL POKOK	18

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Juta Rupiah)	19
2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Juta Rupiah)	20
3.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Rupiah)	21
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Rupiah)	22
5.	Peranan PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Propinsi Sumatera Utara , 2001-2005 (%)	23
6.	Peranan PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (%)	24
7.	Indeks Berantai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	25
8.	Indeks Berantai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	26
9.	Indeks Berantai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	27
10.	Indeks Berantai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	28
11.	Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	29
12.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Tahun 2000 (%)	30
13.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Tahun 2001 (%)	31
14.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Tahun 2002 (%)	32
15.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Tahun 2003 (%)	33
16.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Tahun 2004 (%)	34

17.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Tahun 2005 (%)	35
18.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2000 (%)	36
19.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2001 (%)	37
20.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2002 (%)	38
21.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2003 (%)	39
22.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2004 (%)	40
23.	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2005 (%)	41
24.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 (%)	42
25.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001 (%)	43
26.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002 (%)	44
27.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 (%)	45
28.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004 (%)	46
29.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 (%)	47
30.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000 (%)	48
31.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001 (%)	49
32.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2002 (%)	50
33.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003 (%)	51
34.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 (%)	52

35.	Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005 (%)	53
36.	Indeks Berantai PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100).....	54
37.	Indeks Berantai PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	55
38.	Indeks Berantai PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2004 (Tahun Sebelumnya = 100)	56
39.	Indeks Berantai PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100).....	57
40.	Indeks Berantai PDRB Sektor Bangunan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	58
41.	Indeks Berantai PDRB Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	59
42.	Indeks Berantai PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	60
43.	Indeks Berantai PDRB Sektor Keuangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	61
44.	Indeks Berantai PDRB Sektor Jasa-Jasa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	62
45.	Indeks Berantai PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	63
46.	Indeks Berantai PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	64
47.	Indeks Berantai PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	65
48.	Indeks Berantai PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	66
49.	Indeks Berantai PDRB Sektor Bangunan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	67
50.	Indeks Berantai PDRB Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran ADH Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	68
51.	Indeks Berantai PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ADH Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	69
52.	Indeks Berantai PDRB Sektor Keuangan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut	70

	Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	
53.	Indeks Berantai PDRB Sektor Jasa-Jasa Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Tahun Sebelumnya = 100)	71
54.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (2000 = 100)	72
55.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (2000 = 100)	73
56.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (2000 = 100)	74
57.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (2000 = 100)	75
58.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Bangunan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (2000 = 100)	76
59.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (2000 = 100)	77
60.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (2000 = 100)	78
61.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Keuangan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (2000 = 100)	79
62.	Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Jasa-Jasa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (2000 = 100)	80
63.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Jutaan Rupiah)	81
64.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	82
65.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mandailing Natal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	83
66.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mandailing Natal Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	84
67.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	85
68.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	86
69.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	87

70.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	88
71.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	89
72.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	90
73.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	91
74.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	92
75.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhan Batu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	93
76.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhan Batu Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	94
77.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Asahan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	95
78.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Asahan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	96
79.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	97
80.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	98
81.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	99
82.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	100
83.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	101
84.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	102
85.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	103
86.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	104
87.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	105

88.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	106
89.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	107
90.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	108
91.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	109
92.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	110
93.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	111
94.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	112
95.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	113
96.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	114
97.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serdang Bedagai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	115
98.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serdang Bedagai Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah).....	116
99.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Sibolga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	117
100	Produk Domestik Regional Bruto Kota Sibolga Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	118
101	Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjung Balai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	119
102	Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjung Balai Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	120
103	Produk Domestik Regional Bruto Kota Pematang Siantar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	121
104	Produk Domestik Regional Bruto Kota Pematang Siantar Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	122
105	Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	123

106	Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	124
107	Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	125
108	Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	126
109	Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	127
110	Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	128
111	Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang Sidempuan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	129
112	Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang Sidempuan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)	130

<http://sumut.bps.go.id>

PENDAHULUAN

- 1. Pergeseran Tahun Dasar**
- 2. Pemilihan Tahun Dasar 2000**

1 PENDAHULUAN

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah pada bulan Januari 2001, maka setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri. Dalam rangka evaluasi dan proses penyusunan perencanaan dibutuhkan berbagai indikator-indikator yang dapat menggambarkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada periode tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

1.1. Pergeseran Tahun Dasar

Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan mengalami pergeseran dari tahun 1993 menjadi tahun 2000. Perubahan tahun dasar ini antara lain disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

- a. Secara nasional telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993 menjadi makin tidak realistis.
- b. Struktur ekonomi tahun 1993 belum tersentuh dampak deregulasi dan debirokratisasi. Secara nasional sejak tahun 1991 sektor industri peranannya sudah melampaui sektor pertanian dan menjadi primadona perekonomian Indonesia.
- c. Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik, masih dalam periode tersebut, pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berdampak kepada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Akibatnya struktur ekonomi Indonesia tahun 1993 telah berbeda dengan tahun 2000.

1.2. Pemilihan Tahun Dasar 2000

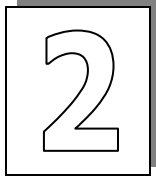
Pada dasarnya penetapan tahun 2000 sebagai tahun dasar secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku panduan yang baru “Sistem Neraca Nasional” dinyatakan bahwa estimasi PDB atau PDRB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5. Hal ini juga merupakan komitmen pimpinan BPS negara ASEAN tahun 2000, agar besaran angka-angka PDB atau PDRB dapat saling diperbandingkan antar negara dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian dunia.

- b. Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi, cakupan terus mengalami penyempurnaan, dalam jangka waktu tujuh tahun juga telah terjadi perubahan struktur/bentuk komoditas serta kombinasi harga yang sangat signifikan. Perbaikan cakupan terutama di sektor industri pengolahan (elektronik/teknologi informatika) serta disektor jasa-jasa. Disisi lain juga terjadi perubahan dalam komposisi harga antara sektor primer, sekunder dan tersier.
- c. BPS telah merampungkan penyusunan Tabel Input-Output Indonesia 2000, termasuk Sumatera Utara untuk tingkat propinsi. Tabel I-O tersebut telah mengalami uji konsistensi pada tingkat sektoralnya dengan mempertimbangkan kelayakan struktur permintaan maupun penawaran. Oleh karena itu struktur ekonomi Indonesia yang digambarkan melalui Tabel I-O dapat dijadikan sebagai kerangka dasar (*benchmarking*) dalam penyempurnaan penghitungan PDB/PDRB, sekaligus dipakai sebagai tahun dasar dalam penyusunan series baru penghitungan PDB/PDRB, baik sektoral maupun penggunaan.
- d. Ketersediaan data dasar (raw data) baik harga maupun volume (quantum) tahun 2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan berkelanjutan dibandingkan kondisi pada tahun 1993. Hal itu dimungkinkan disebabkan berbagai Departemen/Kementrian maupun Instansi Pemerintah lainnya juga ikut membangun statistik bagi keperluan perencanaan sektoralnya masing-masing. Dengan dukungan data yang lebih lengkap, terinci dan konsisten diharapkan estimasi PDB/PDRB dengan tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan konsisten.

TINJAUAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA TAHUN 2005

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
2. Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota
3. Peranan PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB
4. Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral
5. Perbandingan PDRB Perkapita



TINJAUAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA TAHUN 2005

2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan menunjukkan sejauh mana kinerja atau aktivitas dari berbagai sektor ekonomi akan menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Untuk mengetahui fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun, digunakan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota selama tahun 2005 tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang terjadi di tingkat nasional dan regional, khususnya di Sumatera Utara. Ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama tahun 2001-2005 (Tabel 1).

Secara umum tahun 2001 dan 2002 pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan dari 3,98 persen menjadi 4,56 persen.. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang menjadi agenda utama pemerintah menunjukkan adanya perbaikan. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2003 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2002 atau naik 0,25 point yakni sebesar 4,56 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5,74 persen sedang

tahun 2005 mengalami sedikit kelambatan pertumbuhan jika dibanding tahun sebelumnya yakni tercatat sebesar 5,48 persen atau turun 26 point.

Tabel 1.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2001-2005 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
01. Nias	6,67	9,02	7,07	5,13	-3,61
02. Mandailing Natal	6,76	4,30	6,82	5,47	5,85
03. Tapanuli Selatan	7,88	5,75	8,40	3,15	3,37
04. Tapanuli Tengah	4,59	4,87	7,62	5,70	5,14
05. Tapanuli Utara	4,48	4,44	4,68	4,74	5,04
06. Toba Samosir	3,47	7,17	49,87	- 16,04	5,05
07. Labuhan Batu	4,79	4,22	4,04	3,52	3,86
08. Asahan	3,24	2,51	7,25	4,94	3,00
09. Simalungun	3,83	2,83	2,35	2,72	3,06
10. Dairi	1,09	5,44	1,67	5,83	5,34
11. Karo	5,35	2,98	5,29	3,32	4,71
12. Deli Serdang	4,07	5,69	5,06	4,03	5,35
13. Langkat	1,08	3,07	2,95	1,01	3,47
14. Nias Selatan	1)	1)	8,23	7,16	-2,22
15. Humbang Hasundutan	1)	1)	4,74	5,71	5,65
16. Pakpak Bharat	1)	1)	5,73	7,86	7,79
17. Samosir	1)	1)	1)	6,57	4,11
18. Serdang Bedagai	1)	1)	1)	5,22	5,91
Kota					
19. Sibolga	2,44	6,06	5,68	4,76	4,01
20. Tanjung Balai	3,23	5,44	7,43	5,95	4,19
21. Pematang Siantar	1,96	2,07	8,18	3,83	5,67
22. Tebing Tinggi	4,08	5,89	4,63	5,53	4,38
23. Medan	4,60	5,00	5,76	7,29	6,98
24. Binjai	3,96	6,64	9,07	9,00	5,08
25. Padang Sidempuan	1)	1)	4,63	4,63	4,71
Sumatera Utara	3,98	4,56	4,81	5,74	5,48

Catatan :

PDRB Sumatera Utara bukan merupakan penjumlahan dari PDRB Kabupaten/Kota.
PDRB Sumatera Utara dan PDRB Kabupaten/Kota masing-masing dihitung secara terpisah.
1). Masih bergabung dengan kabupaten induknya.

Bila dilihat pertumbuhan di masing-masing kabupaten/kota dari tahun 2001-2005 hampir secara keseluruhan mengalami perbaikan ekonomi kecuali di Kabupaten Nias dan Nias Selatan yang pada Desember 2004 mengalami bencana alam gempa bumi dan tsunami, sehingga mengakibatkan lumpuhnya sebagian besar struktur kehidupan sosial dan ekonomi yang tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kedua daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun di kabupaten/kota secara umum mengalami perkembangan yang menggembirakan. Bahkan di beberapa kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi senantiasa menunjukkan peningkatan, diantaranya : Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir .

2.2. Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor.

Secara umum wilayah Sumatera Utara masih merupakan daerah agraris bahkan dari tahun 2000-2005, sektor pertanian mendominasi dalam pembentukan PDRB, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya sektor industri sempat mendominasi. Keadaan ini memberi gambaran kepada kita bahwa kehidupan masyarakat di Sumatera Utara yang sebagian masih berdomisili di daerah pedesaan sangat kuat ketergantungannya pada sektor pertanian sehingga sektor pertanian masih memegang peranan utama pada sebagian besar kabupaten di Sumatera Utara.

Sampai dengan tahun 2005 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, ada tujuh kabupaten yang peranan sektor pertaniannya berada di atas 50 persen, yaitu : Dairi (67,81 persen), Pakpak Bharat (65,50 persen), Humbang Hasundutan (61,32 persen), Karo (60,42 persen), Tapanuli Utara (56,08 persen), Simalungun (54,66 persen), dan Langkat (51,10 Persen). Sementara peranan sektor pertanian di daerah kota umumnya dibawah 20 persen, seperti Kota Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan sedangkan kota yang peranan sektor pertaniannya berada diatas 20 persen adalah Kota Sibolga dan Tanjung Balai. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya andil sektor pertanian khususnya di Kota Sibolga dan Tanjung Balai, yaitu besarnya kontribusi yang berasal dari sub sektor perikanan khususnya perikanan laut.

Sektor pertambangan dan penggalian, peranannya dimasing-masing daerah umumnya masih cukup kecil hanya berkisar antara 0,01 persen sampai 4,66 persen kecuali Kabupaten Langkat peranannya sebesar 9,65 persen yang merupakan sumbangan dari sub sektor pertambangan migas.

Sektor industri yang dalam tiga tahun terakhir (2003-2005) kembali menjadi *leading* sektor dalam pembentukan PDRB menggeser peran sektor pertanian yang pada tahun sebelumnya memberikan kontribusi terbesar. Meskipun demikian tidak di semua kabupaten/kota sektor industri menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB. Sektor industri menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB umumnya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki potensi perkebunan sekaligus terdapat kegiatan industri khususnya agroindustri yang mengolah hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet.

Sektor listrik, gas dan air minum merupakan sektor terkecil kedua perannya setelah sektor pertambangan dan penggalian, dimana sumbangan sektor ini terhadap pembentukan PDRB daerah masih berada di bawah 1 persen, terkecuali pada tujuh

kabupaten/kota, yaitu : Toba Samosir (1,06 persen), Asahan (1,10 persen), Pematang Siantar (2,02 persen), Medan (2,15 persen), Binjai (1,97 persen).

Peranan sektor bangunan di seluruh kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara masih berada di bawah 10 persen, kecuali Tanjung Balai (10,06 persen).

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang mempunyai pengaruh relatif cukup besar terhadap pembentukan PDRB masing-masing kabupaten/kota. Umumnya peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran di suatu daerah akan besar apabila peranan sektor pertanian dan industri pengolahan mendominasi. Disisi lain sektor perdagangan memegang peran utama dalam pembentukan PDRB suatu daerah biasanya terjadi di daerah-daerah yang menjadi perlintasan antar wilayah dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan keadaan ini umumnya merupakan daerah kota, seperti Kota Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan dan Padang Sidempuan, dengan besaran kontribusi di keempat daerah tersebut secara berurutan adalah 26,84 persen, 22,12 persen, 26,43 persen dan 24,57 persen.

Selanjutnya untuk sektor angkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa memberikan peran yang besar dalam pembentukan PDRB terjadi pada daerah kota disebabkan pusat kegiatan dari sektor ekonomi lainnya umumnya berada pada daerah kota.

2.3. Peranan PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB

Besarnya nilai PDRB yang dihasilkan oleh setiap daerah selain tergantung dari investasi yang ditanamkan di masing-masing daerah, juga sangat dipengaruhi potensi dan kondisi daerah yang bersangkutan. Selama tahun 2005 beberapa daerah yang memberikan sumbangan relatif besar dalam pembentukan PDRB Propinsi Sumatera Utara, yaitu berasal dari Kota Medan sebesar 29,90 persen, Kabupaten Deli Serdang sebesar 13,65 persen, Asahan sebesar 10,89 persen dan Labuhan Batu sebesar 8,73 persen yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara untuk

kabupaten/kota lainnya hanya mampu memberikan sumbangan sekitar 0,15 sampai 5,93 persen.

Tabel 2.
Peringkat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Peranannya
Terhadap Total PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2005

Peringkat	Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rp.)	Peranan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Medan	42.654.261,72	29,90
02.	Deli Serdang	19.476.145,91	13,65
03.	Asahan	15.527.794,21	10,89
04.	Labuhan Batu	12.446.062,73	8,73
05.	Langkat	8.461.166,98	5,93
06.	Simalungun	6.185.608,31	4,34
07.	Serdang Bedagai	5.059.769,44	3,55
08.	Tapanuli Selatan	3.678.201,61	2,58
09.	Karo	3.683.020,63	2,58
10.	Pematang Siantar	2.662.898,06	1,76
11.	Binjai	2.309.596,12	1,62
12.	Dairi	2.303.591,46	1,61
13.	Nias	2.159.952,54	1,51
14.	Mandailing Natal	2.004.424,55	1,41
15.	Toba Samosir	1.977.269,80	1,39
16.	Tanjung Balai	1.765.169,09	1,24
17.	Tapanuli Utara	2.155.279,13	1,22
18.	Nias Selatan	1.458.639,28	1,02
19.	Humbang Hasundutan	1.387.607,89	0,97
20.	Tapanuli Tengah	1.296.693,76	0,91
21.	Tebing Tinggi	1.253.172,70	0,88
22.	Padang Sidempuan	1.138.939,24	0,80
23.	Samosir	1.111.859,37	0,78
24.	Sibolga	561.749,79	0,58
25.	Pakpak Barat	216.191,48	0,15
Total PDRB Kabupaten/Kota		119.943.365,90	100,00

Dilihat dari profil kabupaten/kota penyumbang terbesar terhadap total PDRB Sumatera Utara, diketahui bahwa empat penyumbang terbesar merupakan daerah konsentrasi industri, seperti Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang, dan juga

merupakan daerah industri yang berbasis perkebunan (*agroindustri*). Kabupaten Pakpak Bharat, pecahan dari Kabupaten Dairi merupakan daerah yang paling kecil sumbangannya terhadap total PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara, sebesar 0,15 persen.

2.4. Peranan NTB Sektoral Kabupaten/Kota Terhadap Total NTB Sektoral

Sumbangan kabupaten/kota dalam pembentukan NTB masing-masing sektor terhadap total NTB sektoral seluruh kabupaten/kota cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan potensi ekonomi antar wilayah yang satu dengan lainnya. Secara keseluruhan Kota Medan sebagai ibukota propinsi umumnya masih mendominasi dalam pembentukan NTB Sektoral di Sumatera Utara, khususnya yang berasal dari sektor tertier dan sekunder.

Sektor Pertanian

Pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan menyebabkan adanya pergeseran fungsi lahan terutama di sektor pertanian yang beralih penggunaannya kepada sektor bangunan dan sektor lainnya. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2005, ada tiga kabupaten yang sektor pertaniannya memberikan sumbangan terbesar di atas 10 persen dalam pembentukan PDRB sektor pertanian di Sumatera Utara. Kabupaten Asahan memberikan sumbangan terbesar, yaitu 12,24 persen, diikuti Kabupaten Langkat 12,18 persen dan Labuhan Batu sebesar 11,82 persen. Selanjutnya peranan sektor pertanian kabupaten lain bervariasi dengan andil berkisar antara 0,07 persen hingga 9,53 persen. Untuk daerah perkotaan peran sektor pertanian umumnya cukup kecil dengan andil dibawah 1 persen kecuali Medan dan Tanjung Balai dengan

andil masing-masing sebesar 3,77 persen dan 1,05 persen yang umumnya berasal dari perikanan laut.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Peranan terbesar sektor ini berasal dari Kabupaten Langkat, yaitu sebesar 55,02 persen disebabkan untuk pertambangan migas dominan berasal dari daerah ini. Kemudian diikuti Kabupaten Deli Serdang sebesar 11,60 persen, Karo 11,58 persen, Nias 3,76 persen, Labuhan Batu 2,59 persen, Mandailing Natal 2,26 persen, Tanjung Balai 2,25 persen, Asahan 2,02 persen, Nias Selatan 1,90 persen, Serdang Bedagai 1,25 persen. Selebihnya peranan sektor ini untuk masing-masing daerah hanya berkisar di bawah 1 persen.

Sektor Industri Pengolahan

Sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB sektor industri pengolahan berasal dari daerah konsentrasi industri khususnya yang berorientasi kepada hasil perkebunan besar. Dalam hal ini Kabupaten Deli Serdang merupakan penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 25,61 persen, kemudian diikuti oleh Medan sebesar 19,72 persen, Asahan dengan andil 17,57 persen dan Labuhan Batu dengan andil 15,97 persen. Selebihnya peranan sektor ini dari masing-masing daerah hanya berkisar di bawah 4 persen.

Sektor Listrik, Gas dan Air Minum

Kota Medan merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB tahun 2005 untuk sektor ini di Sumatera Utara, yaitu sebesar 59,72 persen jauh melebihi sumbangan daerah lainnya. Daerah lain yang memiliki andil cukup besar dibandingkan

daerah lainnya adalah Asahan 11,07 persen dan Pematang Siantar 3,50 persen, Deli Serdang dan Langkat masing-masing 3,24 persen dan 3,02 persen. Sedangkan selebihnya rata-rata memiliki andil dibawah 3 persen.

Sektor Bangunan

Sumbangan terbesar sektor bangunan sampai dengan tahun 2005 masih berasal dari daerah-daerah besar seperti Kota Medan dimana andilnya diatas 50 persen tepatnya sebesar 54,74 persen, Kabupaten Asahan sebesar 4,56 persen dan Langkat 3,43 persen. Disamping ketiga daerah tersebut, Kabupaten Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Binjai, Mandailing Natal, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Nias, Nias Selatan dan Karo juga mempunyai peran cukup besar dalam pembentukan sektor ini di Sumatera Utara yang berkisar antara 2 – 5 persen. Selebihnya setiap daerah memberikan andil antara 0,29 – 1,91 persen.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sampai dengan tahun 2005, daerah yang memberikan kontribusi terbesar umumnya berasal dari daerah yang sumbangan sektor pertanian dan atau sektor industrinya relatif besar seperti Kota Medan dimana peranan sektor perdagangan, hotel dan restorannya relatif jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya dengan kontribusi sebesar 40,67 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar 15,31 persen, Asahan sebesar 10,82 persen dan Labuhan Batu sebesar 4,82 persen. Sementara daerah kabupaten/kota lainnya bervariasi dengan andil kurang dari 4 persen, dimana peranan terkecil berasal dari Kabupaten Pakpak Bharat dengan andil sebesar 0,10 persen.

Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor angkutan yang terdiri dari angkutan darat, laut, maupun udara merupakan sarana transportasi yang menunjang lancarnya roda perekonomian. Disamping itu, sektor komunikasi juga merupakan sarana pengiriman serta penyampaian berita yang cepat, aman dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Berbagai sarana pos dan telekomunikasi telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diantaranya telah tersedia kantor pos, telepon, telegram, telex, telepon umum dan jaringan internet. Kontribusi terbesar untuk sektor ini pada tahun 2005 masih tetap berasal dari Kota Medan, yaitu sebesar 65,46 persen, jauh di atas dibandingkan kontribusi yang diberikan oleh daerah lainnya yang masing-masing masih berada di bawah 5,16 persen dan yang terkecil berasal dari Kabupaten Pakpak Barat dengan andil sebesar 0,02 persen.

Sektor Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sejalan dengan perkembangan sektor angkutan dan komunikasi, hingga tahun 2005, Kota Medan masih merupakan kontributor terbesar sektor ini dengan andil sebesar 66,86 persen. Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena Kota Medan disamping sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara juga masih tetap eksis sebagai pusat perekonomian di Sumatera Bagian Utara. Sementara daerah lainnya, perbedaan kontribusinya masih sangat jauh yaitu kurang dari 5 persen.

Sektor Jasa-Jasa

Pada tahun 2005, Kota Medan masih mendominasi kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB Sumatera Utara yang menyumbang sebesar 33,68 persen, kemudian diikuti Kabupaten Deli Serdang sebesar 13,85 persen, Serdang Bedagai dan Langkat

serta Simalungun masing-masing sebesar 5,93 persen, 4,33 persen dan 4,07 persen. Sedangkan daerah-daerah lain masih berkisar kurang dari 4 persen.

2.5. Perbandingan PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah atau daerah. Adanya peningkatan perekonomian dengan melambatnya perkembangan pertumbuhan penduduk, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan PDRB perkapita.

PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB Perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel di atas. Dengan disajikannya PDRB Perkapita seluruh daerah kabupaten/kota, diharapkan dapat membantu para pemakai data dalam melakukan perbandingan, baik antara kabupaten/kota maupun antara satu tahun dengan tahun berikutnya.

Daerah yang memiliki PDRB Perkapita tinggi, masih berasal dari daerah-daerah potensial yang memiliki lahan perkebunan besar dan juga daerah konsentrasi industri. PDRB Perkapita tertinggi pada tahun 2005 di Sumatera Utara berasal dari **Kota Medan** yaitu sebesar **Rp.20.948.127** kemudian diikuti Kabupaten Asahan Rp.15.158.399, Kabupaten Labuhan Batu Rp. 13.076.713, Toba Samosir Rp. 12.460.973, Deli Serdang Rp. 12.408.049, Kabupaten Karo sebesar Rp.11.647.499, Kota Tanjung Balai sebesar

Rp.11.551.095, Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 10.912.894. Kabupaten/Kota yang PDRB Perkapitanya masih di bawah lima juta rupiah berasal dari Kabupaten Nias dan Tapanuli Tengah. Sementara daerah lainnya berkisar antara lima sampai dengan sembilan juta rupiah.

Tingginya peningkatan PDRB perkapita ternyata belum menunjukkan membaiknya kesejahteraan masyarakat, oleh karena angka ini masih dipengaruhi oleh banyak faktor yang antara lain tingkat laju inflasi atau naiknya harga barang dan jasa yang sangat tinggi sehingga kurang menggambarkan kenaikan tingkat kesejahteraan secara riil.

Jika ditinjau dari sudut harga konstan 2000, pada tahun 2005 PDRB perkapita tertinggi berasal dari Kota Medan sebesar 12,41 juta rupiah dan Kabupaten Asahan sebesar 9,53 juta rupiah, Kabupaten Labuhan Batu sebesar 8.96 juta rupiah sedangkan PDRB perkapita terendah berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu sebesar 3,14 juta rupiah.

Untuk selanjutnya, berikut ini disajikan tabel-tabel secara lengkap yang terdiri dari tabel-tabel pokok PDRB beserta tabel-tabel turunan baik secara sektoral maupun secara runtun waktu yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.



Tabel-Tabel Pokok

<http://sumbapbs.go.id>